

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum
entitas dan
rencana
strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Swasembada Timur XIII No.64 Tanjung Priok dan Jl. Enggano Raya No.16 Tanjung Priok, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia. Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II berkomitmen dengan :

VISI:

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II yang kompeten dan profesional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
9. Terkelolanya anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II secara optimal.

*Pendekatan
penyusunan
laporan
keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai KIPM Jakarta II menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Kantor Balai Kipm Jakarta II dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standard Akutansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akutansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari *Satker* BALAI KIPM JAKARTA II Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan - kebijakan Akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Satker*. Balai KIPM JAKARTA II adalah sebagai berikut :

*Pendapatan
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KasUmum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akutansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK No.65/PMK.06/2017 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KMK.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut :

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implentasi
akuntansi
berbasis
akrual
pertama
kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2024 yang berbasis *cash to ward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2024 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Kantor BALAI KIPM JAKARTA II** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah, penambahan dana APBNP dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	8,873,710,000	8,873,710,000
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	52,740,000	52,740,000
Jumlah Pendapatan	8,926,450,000	8,926,450,000
Belanja		
Belanja Pegawai	7,837,283,000	7,837,283,000
Belanja Barang	6,830,533,000	6,830,533,000
Belanja Modal	2,747,000,000	2,747,000,000
Jumlah Belanja	17,414,816,000	17,414,816,000

Realisasi

Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp.7.818.896.088,

-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp.7,818,896,088,-** atau mencapai **87,59 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp.8,926,450,000,-**. Keseluruhan Pendapatan Kantor BALAI KIPM JAKARTA II terdiri dari Pendapatan sensor/karantina, dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	8,873,710,000	7,808,980,000	88.00
2. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	52,740,000	900,000	1.71
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		2,654,054	
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2,185,134	-
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4,176,900	-
6. Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	8,926,450,000	7,818,896,088	87.59

Realisasi Pendapatan Jasa (sensor/Karantina Ikan) TA.2024 mengalami penurunan sebesar 30.72% dibandingkan periode TA.2023. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pelayanan (Jasa) Karantina Ikan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor BALAI KIPM JAKARTA II. Terdapat adanya :

1. Realisasi Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp.7,808,980,000,-.
2. Realisasi Pendapatan dari Penjualan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp.900,000,-.
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp.2,654,054,-.
4. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.2,185,134,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa belanja tunjangan fungsional/umum senilai Rp.185,134,- dan belanja tunjangan kinerja senilai Rp.2,000,000,- Balai KIPM Jakarta II.
5. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.4,176,900,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa pemeliharaan gedung Balai KIPM Jakarta II.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA.2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DES 2024	REALISASI 31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	107,748,826	(100)
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	7,808,980,000	11,119,980,000	(29,7)
3. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	900.000	57,800,000	(98,44)
4. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.654.054		
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2,185,134	-	-
6. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4,176,900	-	-
7. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
8. Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan	7,818,896,088	11,285,528,826	(30.72)

Realisasi Belanja
Negara
Rp.10.006.904.556,-

B.2. Belanja

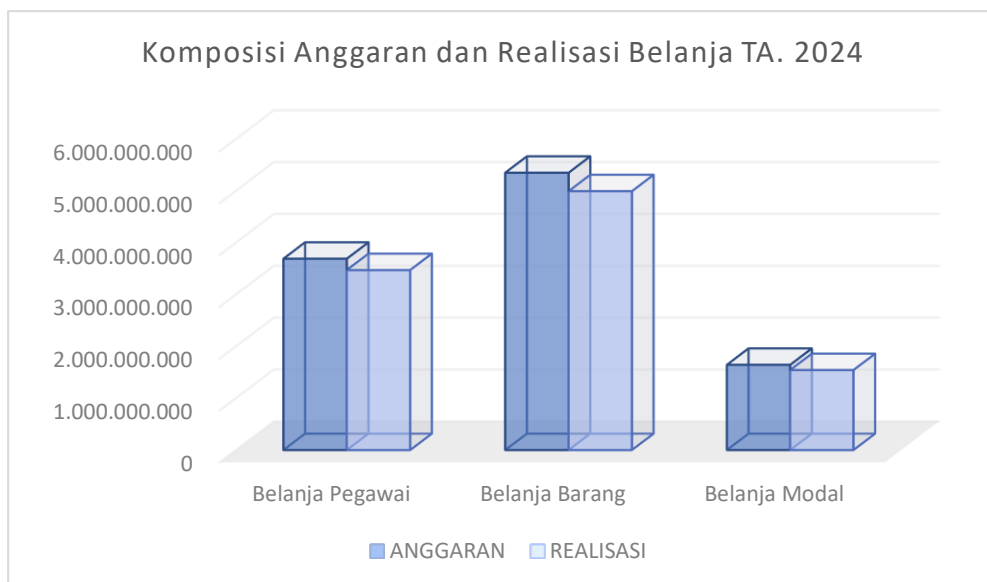
Realisasi Belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II pada **TA.2024** adalah sebesar **Rp.10.006.904.556,-** atau sebesar **32,44 persen** dari anggarannya sebelum dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II per **TA.2024** adalah sebesar **Rp.10.683.142.000,-**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3,690,668,000	3,472,236,682	94.08
Belanja Barang	5,349,391,000	4,992,815,246	93.33

Belanja Modal	1,643,083,000	1,542,273,161	93.86
Total Belanja Kotor	10.683.142.000	10,007,325,089	93.67
Pengembalian Belanja	-	420,533	-
Belanja Netto	10.683.142.000	10.006.904.556	93.67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2024

Dibandingkan dengan TA.2023, Realisasi Belanja Periode TA.2024 mengalami penurunan sebesar 32.44% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa pegawai Balai KIPM Jakarta II yang pindah ke Badan Karantina Indonesia.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,472,236,149	7,687,825,495	(54.83)
Belanja Barang	4,992,395,246	6,592,316,153	(24.27)
Belanja Modal	1,542,273,161	530,899,896	190.50
Jumlah Belanja	10.006.904.556	14.811.041.544	(32.44)

Belanja Pegawai
Rp.3.472.236.149,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai **TA.2024** dan **TA.2023** adalah masing-masing sebesar **Rp.3,472,236,149,-** dan **Rp.7,687,825,495,-**. Belanja

Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA.2024 dengan TA.2023 mengalami penurunan sebesar **54.83%** dikarenakan adanya beberapa pegawai Balai KIPM Jakarta II yang pindah ke Badan Karantina Indonesia.

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,460,970,682	7,476,586,535	(53,71)
Belanja Lembur	11,266,000	211,239,000	(94,67)
Jumlah Belanja Kotor	3,472,236,682	7,687,825,535	(54,83)
Pengembalian Belanja Pegawai	-533	-40	1,232.50
Jumlah Belanja Bersih	3,472,236,149	7,687,825,495	(54.83)

Belanja Barang
Rp.4,992,395,246,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per **TA.2024** dan **TA.2023** adalah masing-masing sebesar **Rp.4,992,395,246,-** dan **Rp.6,592,316,153,-**. Realisasi Belanja Barang TA.2024 mengalami penurunan sebesar **24.27%** dari Realisasi Belanja Barang TA.2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perpindahan anggaran kegiatan belanja barang dari Balai KIPM Jakarta II ke Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,244,088,043	2,054,125,082	(39.43)
Belanja Barang Non Operasional	220,400,630	450,113,480	(51,03)
Belanja Barang Persediaan	872,682,950	1,030,583,817	(15,32)
Belanja Jasa	1,447,538,336	1,138,135,682	27.19
Belanja Pemeliharaan	564,716,413	801,171,102	(29.51)
Belanja Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	643,388,874	1,119,241,990	(42.52)
Jumlah Belanja Kotor	4,992,815,246	6,593,371,153	(24.28)
Pengembalian Belanja	(420,000)	(1,055,000)	(60.19)

Jumlah Belanja Bersih	4,992,395,246	6,592,316,153	(24.27)
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

Belanja Modal

Rp.1.542.273.161,

-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.542.273.161,-** dan **Rp.530.899.896,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode TA.2024 mengalami kenaikan sebesar **190.50%** dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA.2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya perpindahan aset belanja modal dari Balai KIPM Jakarta II ke Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2024 dan TA.2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,074,452,000	530,899,896	102.38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	467,821,161	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.542.273.161	530,899,896	190.50
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	1.542.273.161	530.899.896	190.50

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp.1,074,452,000,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode TA.2024 dan periode TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.1,074,452,000,-** dan **Rp.530,899,896,-** dan mengalami penurunan sebesar 50.59% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA.2023. Hal ini disebabkan karena perpindahan anggaran kegiatan belanja modal dari Balai KIPM Jakarta II ke Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Alat Bantu	-	-	-
Alat Ukur	-	-	-
Alat Kantor	-	-	-
Alat Rumah Tangga	-	-	-
Alat Studio	92.369.000	-	100

Peralatan Pemancar	-	-	-
Alat Kesehatan Umum	-	-	100
Unit Alat Laboratorium	332.400.000	-	-
Alat Laboratorium Fisika/Elektronika	-	-	-
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	-	338,400,00	-
Alat Khusus	-	-	-
Komputer Unit	594.917.000	182,600,000	69.31
Peralatan Komputer	54.766.000	9,899,896	81.92
Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-
Alat Pengolahan	-	-	-
Alat Komunikasi	-	-	-
Pengembangan Mobil Pickup	-	-	-
Dst.....	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,074,452,000	530,899,896	(65.59)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1,074,452,000	530,899,896	(65.59)

C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA.2024 dan 2023

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Uang Tunai	-	-
Uang Muka	-	-
Kuitansi yang belum di SP2D kan	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal TA.2024 dan TA.2023 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-

Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp.0,-

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.2.000.000,-**. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Piutang Bukan Pajak TA.2024 dan 2023

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Piutang Bukan Pajak	-	2,000,000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	2,000,000

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp.0,-

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek TA. 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.10.000,-**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-

Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp.0,-

C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang PNPB per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.1.990.000,-**. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Piutang Bukan Pajak TA.2024 dan 2023

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Piutang Bukan Pajak	-	1,990,000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	1,990,000

Persediaan
Rp.516.354.792,-

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.516.354.792,-** dan **Rp.412.602.767,-**. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Persediaan TA. 2024 dan 2023

Persediaan	31 Des 2024	31 Des 2023
Barang Konsumsi	152,268,444	349,350,419
Bahan untuk Pemeliharaan	-	139,000
Suku Cadang	4,402,658	4,442,658
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	359,683,690	58,670,690
Jumlah	516.354.792	412,602,767

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp.10.118.066.000,-

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BALAI KIPM JAKARTA II per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.10.118.066.000,-** dan **Rp. 10.118.066.000,-**. Mutasi tambah nilai tanah tersebut karena adanya koreksi pencatatan nilai oleh KPKNL dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Saldo Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.118.066.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2024	10.118.066.000

Tabel 23 Rincian Tanah

Luas	Lokasi	Nilai
780 m2	Jl. Swasembada Timur XIII No.64, Tanjung Priok	10.118.066.000
Jumlah		10.118.066.000

Peralatan dan Mesin

Rp.12.756.545.248,-

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp.12.756.545.248,-** dan **Rp.16.359.346.851,-**. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 30 Desember 2024	12,756,545,248
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2024	-
Nilai Buku per 30 Desember 2024	12,756,545,248

Gedung dan
Bangunan
Rp.5.361.406.003,-

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah **Rp.5.361.406.003,-** dan **Rp.10.358.049.540,-**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Desember 2024	5,361,406,003
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2024	-
Nilai Buku per 30 Desember 2024	5,361,406,003

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp.18.675.000,-

C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.18.675.000,-** dan **Rp.316.816.000,-**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan tambah daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2024	18,675,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	18,675,000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(12.446.291.811,-)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing **Rp.(12.446.291.811,-)** dan **Rp.(15.616.482.379,-)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan

kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	12,756,545,248	11,617,556,283	1,138,988,965
Gedung dan Bangunan	5,361,406,003	818,008,902	4,543,397,101
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,675,000	10,726,626	7,948,374
Akumulasi Penyusutan	18,136,626,251	12,446,291,811	5,690,334,440

Aset Tak Berwujud
Rp.349.800.000,-

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah **Rp.349.800.000,-** dan **Rp.349.800.000,-**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud Balai KIPM Jakarta II berupa software. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	349.800.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-349.800.000
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Tabel 29 Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software	349.800.000
Jumlah	349.800.000

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.349.800.000,-

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing **Rp.349.800.000,-** dan **Rp.349.800.000,-**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	349.800.000	349.800.000	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	349.800.000	349.800.000	-

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.23.718.727,-

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp.23.718.727,-** dan **Rp.38.787.816,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Balai KIPM Jakarta II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja barang yang masih harus dibayar	23,718,727	Listrik dan Telepon Swasembada dan Muara Baru Bulan Desember 2024
Total	23,718,727	

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp.0,-

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada Kantor Balai KIPM Jakarta II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah
Pengadaan Bahan Laboratorium	-
Listrik	-
Telkom	-
PAM	-
Perpanjangan STNK	-
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	-
Pemeliharaan Printer dan Laptop/PC	-
Keperluan Perkantoran	-
Penambah Daya Tahan Tubuh	-
Perjadin	-
Persediaan Bahan Laboratorium	-
Belanja Bahan	-
Pengiriman Pos	-
Layanan Sampah	-
Jumlah	0

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan dan pencatatannya berdasarkan Dokumen BAST.

Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Tabel 33 Rincian Uang Muka dari KPPN

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	0
Tambahan uang Persediaan	-
Jumlah	0

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp.0,-

C.17 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kantor Balai KIPM Jakarta II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023
Pajak yang belum disetor	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp.16.301.036.505,-

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.16.301.036.505,-** dan **Rp.21.911.600.963,-**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp.7,812,534,054,
-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.7,812,534,054,-** dan **Rp.11.177.780.000,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 34 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2024 dan 2023

URAIAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	7,808,980,000	11,119,980,000	(29.77)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	900,000	57,800,000	(98.44)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2,654,054	-	-
Jumlah	7,812,534,054	11,177,780,000	(30.11)

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya, Pendapatan/Jasa Sensor Karantina Perikanan dan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

Beban Pegawai
Rp.3.472.236.149,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.3.472.236.149,-** dan **Rp.7.687.825.495,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 35 Rincian Beban Pegawai TA. 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2024	TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,784,637,298	3,880,462,768	(54.01)
Beban Tunjangan-Tunjangan	1,676,333,384	3,596,123,767	(53.38)
Beban Lembur	11,266,000	211,239,000	(94.67)
Pengembalian Belanja	(533)	(40)	12.32
Jumlah	3,472,236,149	7,687,825,495	(54.83)

Beban Persediaan
Rp.880.523.050,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.880.523.050,-** dan **Rp.1.585.618.697,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang - barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Persediaan TA. 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	701.916.050	977.206.360	(28.17)
Beban Bahan Baku	178.607.000	608.412.337	(70.64)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	880,523,050	1,585,618,697	(41.47)

Beban Barang
dan Jasa
Rp.2.896.957.920,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.896.957.920,-** dan **Rp.3.643.006.260,-**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	999.327.168	1.519.475.282	(34.23)
Beban Penambah Daya tahan tubuh	23.691.375	191.496.800	(87.63)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54.500	251.500	(78.33)
Beban Honor Output Satuan Kerja	129.612.000	189.545.000	(31.62)
Beban Barang Operasional Lainnya	91.403.000	153.301.500	(40.38)
Beban Bahan	219.856.630	416.453.480	(47.21)
Beban Honor Output Kegiatan	544.000	8.160.000	(93.33)
Beban Barang Non Operasional lainnya	-	4.500.000	(100)
Beban Langganan Daya dan Jasa	427.444.609	510.354.736	(16.25)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.800.000	7.650.000	(76.47)
Beban Sewa	41.781.182	94.280.126	(55.68)
Beban Jasa Profesi	17.650.000	31.000.000	(43.06)
Beban Jasa Lainnya	943.793.456	496.537.836	(90.07)
Belanja Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	20.000.000	(100)
Jumlah	2,896,957,920	3,643,006,260	(20.48)

Beban

Pemeliharaan

Rp.564.895.413,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.564.895.413,-** dan **Rp.879.224.612,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA.2024 dan TA.2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Pemeliharaan TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	159.791.451	317.029.826	(49.60)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	404.924.962	484.141.276	(16.36)
Beban Pemeliharaan jaringan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	139.000	19.430.000	(99.28)
Beban Persediaan Suku Cadang	40.000	58.623.510	(99.93)
Jumlah	564,895,413	879,224,612	(35.75)

Beban Perjalanan

Dinas

Rp.642.968.874,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.642.968.874,-** dan **Rp.1.119.241.990,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	402.498.984	376.283.699	6.97
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	188.719.890	495.151.479	(61.89)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51.750.000	7.130.000	625.81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		240676812	(100)
Jumlah	642,968,874	1,119,241,990	(42.55)

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp. 797,631,543,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.797,631,543,-** dan **Rp.1.250.949.389,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA.2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	607,404,860	919.461.363	(33.94)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	184,666,612	233.467.968	(20.90)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5,560,071	10.570.058	(47.40)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	797,631,543	1.163.499.389	(31.45)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		87.450.000	(100)
Beban Penyusutan aset lain-lain		-	-
Jumlah Amortisasi		87.450.000	(100)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	797,631,543	1,250,949,389	(36.24)

Surplus /Defisit

dari Kegiatan Non

Operasional

Rp.4.362.034,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Kegiatan Non Operasional TA.2024 dan 2023

URAIAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	27,608,826	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,362,034	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	4,362,034	27,608,826	(84.201)

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.21.911.600.963,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.911.600.963,-** dan **Rp.23.210.524.862,-**.

Defisit LO
Rp.(1,438,316,861),
-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada TA.2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.(1,438,316,861),-** dan **(Rp.4.960.477.617,-)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0,-

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA.2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-

Jumlah	-
---------------	---

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang dilakukan jika ditemukan kesalahan atau penilaian yang kurang tepat dalam reklasifikasi awal untuk melakukan pemindahan suatu akun. Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.968.000,-**.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.(9.412.500,-)

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.(9.412.500,-)** dan **Rp.0,-**. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut adalah koreksi nilai Peralatan dan Mesin yang merupakan perbedaan nilai buku akibat rekla keluar – rekla masuk mengakibatkan masa manfaat pada jenis barang.

Tabel 43 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Peralatan dan Mesin	(9,412,500)
Jumlah	(9,412,500)

Koreksi Lain-Lain
Rp.10.000,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.10.000,-** dan **Rp.0,-**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 44 Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Pendapatan	10.000

Koreksi Beban	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	10.000

Transaksi Antar
Entitas
(Rp.4,162,845,097,-
)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **(Rp.4,162,845,097,-)** dan **Rp.3.658.595.718,-**. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2024	2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	(10.006.904.556)	(14.811.041.544)
Diterima dari Entitas Lain	7.818.896.088	11.285.528.826
Transfer Keluar	6.462.624.690	-
Transfer Masuk	(111.771.125)	(133.083.000)
Jumlah	(4,162,845,097)	3,658,595,718

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.7.818.896.088,- sedangkan DKEL sebesar Rp.(10.006.904.556),-

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.6.462.624.690,- yang merupakan alih status asset dari Balai KIPM Jakarta II ke Badan Karantina Indonesia. Sedangkan transfer masuk merupakan perpindahan sertifikat KID sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.111.771.125,- terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Barang Konsumsi	KID	22,799,000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	HC	88.972.125
Jumlah		(111,771,125)

Ekuitas Akhir

Rp.16.301.036.505,

-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.16.301.036.505,-** dan **Rp.21.911.600.963,-**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN - KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

Ada beberapa hal yang akan Balai KIPM Jakarta II ungkapkan, antara lain:

1. Terdapat SK Pengelola Anggaran dengan Nomor SK No.B.23/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/III/2024 tanggal 01 Maret 2024.
2. Terdapat SK Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah (UAKPA/BARANG) dengan Nomor SK No.B.12/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
3. Terdapat SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor SK No.B.14/KPA/BKIPM.JKT.II/KPA/KU.110/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
4. Terdapat SK Pengelola PNBP dengan Nomor SK No.B.13/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
5. Terdapat Aset Tak Berwujud senilai Rp.349.800.000,- berupa Aplikasi Penerbitan HC Eksport (Spectraline).
6. Adanya transfer masuk dari Sekretariat Badan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan (KID) senilai Rp.22,799,000,- dan Pita Cukai, Materai dan Leges senilai Rp.88.972.125,-. Transfer keluar senilai Rp. 6,462,624,690 berupa *computer supplies*, ATK, belanja modal yang diserahkan, dan persediaan bahan lab.

7. Utang kepada pihak ketiga senilai Rp.23.718.727,- berupa tagihan listrik dan telepon bulan Desember 2024 di Swasembada dan Muara Baru, dengan rincian Listrik Muara Baru Rp.2.768.767,- ; Listrik Swasembada Rp.16.433.578,- ; Telepon Muara Baru Rp.70.388,- ; dan Telepon Swasembada Rp.4.445.994,- .
8. Terdapat Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar **Rp.(9.412.500,-)** yang merupakan perbedaan nilai buku akibat reklas keluar – reklas masuk mengakibatkan masa manfaat pada jenis barang.
9. Terdapat Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp.(2.654.054),- .Denda keterlambatan pengajuan SPM belanja modal karena melebihi tanggal BAST Kontrak.
10. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp.900.000,- merupakan milik Badan Mutu.
11. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.2,185,134,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa belanja tunjangan fungsional/umum senilai Rp.185,134,- dan belanja tunjangan kinerja senilai Rp.2,000,000,- Balai KIPM Jakarta II
12. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.4,176,900,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa pemeliharaan gedung Balai KIPM Jakarta II

F.3. Pengungkapan Program Prioritas Nasional (PN) TA 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Balai KIPM Jakarta II Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp.3,126,083,000,- dan realisasi Rp.2,496,964,553,- atau 79.88% dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA II TA. 2024**

Kode	Nama Keg	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
3989.PDC.001	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	59.500.000	59,142,044	99,4	produk	325	325	100
3989.PDC.002	Produk Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang di validasi	20.500.000	17,350,000	84,63	produk	217	217	100
3989.PDF.002	Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang divalidasi	151.000.000	134,687,586	84,63	lembaga	20	20	100
3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	304.500.000	302,114,000	99,87	produk	1	1	100
3989.QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	14.000.000	12,848,549	91,78	lembaga	22	22	100
3989.QIC.002	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	295.500.000	286.612.315	96,99	lembaga	100	100	100
3989.RAL.001	Sarana Pengujian Mutu	1.143.083.000	1,074,452,000	94	unit	1	1	100
3989.RBQ.001	Prasarana Pengujian Mutu	500.000.000	467,821,161	93,55	unit	10	10	100
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang Terakreditasi di Laboratorium Acuan dan Penguji Sektor Kelautan dan Perikanan	55.000.000	54,852,804	99,73	Kegiatan	1	1	100
7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	7.000.000	4,096,457	58,52	lembaga	1	1	100
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	29.000.000	27,301,380	94,14	lembaga	1	1	100
7010.QDC.001	Masyarakat yang Meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	490.000.000	294,917,403	60,19	Orang	220	220	100
7010.QIA.001	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	57.000.000	47,381,169	83,12	produk	1	1	100

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II 649682

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 11:03 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,926,450,000	7,818,896,088	(1,107,553,912)	88	9,829,845,000	11,285,528,826	(1,455,683,826)	115
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,926,450,000	7,818,896,088	(1,107,553,912)	88	9,829,845,000	11,285,528,826	(1,455,683,826)	115
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	8,926,450,000	7,818,896,088	(1,107,553,912)	88	9,829,845,000	11,285,528,826	(1,455,683,826)	115
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	10,683,142,000	10,006,904,556	(676,237,444)	94	14,902,255,000	14,811,041,544	91,213,456	99
1. Belanja Pegawai	3,690,668,000	3,472,236,149	(218,431,851)	94	7,768,606,000	7,687,825,495	80,780,505	99
2. Belanja Barang	5,349,391,000	4,992,395,246	(356,995,754)	93	6,602,414,000	6,592,316,153	10,097,847	100
3. Belanja Modal	1,643,083,000	1,542,273,161	(100,809,839)	94	531,235,000	530,899,896	335,104	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II 649682

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 11:03 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	10,683,142,000	10,006,904,556	(676,237,444)	94	14,902,255,000	14,811,041,544	91,213,456	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 23 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 23/01/25 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 11:04 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(10,000)	10,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	1,990,000	(1,990,000)	(100.00)
Persediaan	516,354,792	412,602,767	103,752,025	25.15
JUMLAH ASET LANCAR	516,354,792	414,592,767	101,762,025	24.55
ASET TETAP				
Tanah	10,118,066,000	10,118,066,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	12,756,545,248	16,359,346,851	(3,602,801,603)	(22.02)
Gedung dan Bangunan	5,361,406,003	10,358,049,540	(4,996,643,537)	(48.24)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,675,000	316,816,000	(298,141,000)	(94.11)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,446,291,811)	(15,616,482,379)	3,170,190,568	(20.30)
JUMLAH ASET TETAP	15,808,400,440	21,535,796,012	(5,727,395,572)	(26.59)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	349,800,000	349,800,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(349,800,000)	(349,800,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	16,324,755,232	21,950,388,779	(5,625,633,547)	(25.63)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	23,718,727	38,787,816	(15,069,089)	(38.85)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23,718,727	38,787,816	(15,069,089)	(38.85)
JUMLAH KEWAJIBAN	23,718,727	38,787,816	(15,069,089)	(38.85)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,301,036,505	21,911,600,963	(5,610,564,458)	(25.61)
JUMLAH EKUITAS	16,301,036,505	21,911,600,963	(5,610,564,458)	(25.61)
JUMLAH EKUITAS	16,301,036,505	21,911,600,963	(5,610,564,458)	(25.61)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,324,755,232	21,950,388,779	(5,625,633,547)	(25.63)

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 23 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 11:04 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	152,268,444	0
0.0	117114	Suku Cadang	4,402,658	0
0.0	117131	Bahan Baku	359,683,690	0
0.0	131111	Tanah	10,118,066,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,756,545,248	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,361,406,003	0
0.0	134113	Jaringan	18,675,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,617,556,283
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	818,008,902
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,726,626
0.0	162151	Software	349,800,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	349,800,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	23,718,727
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,006,904,556
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,818,896,088	0
0.0	313211	Transfer Keluar	6,462,624,690	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	111,771,125
0.0	391111	Ekuitas	0	21,911,600,963
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,412,500	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	10,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	7,808,980,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	900,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,654,054
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,134
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,176,900
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,258,412,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,696	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	114,590,840	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	35,735,180	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	11,160,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	88,055,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,099,349	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	80,748,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	174,239,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,580,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	11,266,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,676,333,384	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 11:04 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	999,327,168	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	23,691,375	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	129,612,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	91,403,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	219,856,630	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	544,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	340,719,042	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	71,009,599	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	15,715,968	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,800,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	41,781,182	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	17,650,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	943,793,456	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	159,791,451	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	404,924,962	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	402,498,984	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	188,719,890	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51,750,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	607,404,860	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	184,666,612	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,560,071	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	701,916,050	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	139,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	40,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	178,607,000	0
JUMLAH			52,666,993,270	52,666,993,270

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 23 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DEDI SUPARDI

NIP. 198105092005021003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 11:03 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,812,534,054	11,177,780,000	(3,365,245,946)	(30.107)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	7,812,534,054	11,177,780,000	(3,365,245,946)	(30.107)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	7,812,534,054	11,177,780,000	(3,365,245,946)	(30.107)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,472,236,149	7,687,825,495	(4,215,589,346)	(54.835)
Beban Persediaan	880,523,050	1,585,618,697	(705,095,647)	(44.468)
Beban Barang dan Jasa	2,896,957,920	3,643,006,260	(746,048,340)	(20.479)
Beban Pemeliharaan	564,895,413	879,224,612	(314,329,199)	(35.751)
Beban Perjalanan Dinas	642,968,874	1,119,241,990	(476,273,116)	(42.553)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 23/01/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 11:03 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	797,631,543	1,250,949,389	(453,317,846)	(36.238)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,255,212,949	16,165,866,443	(6,910,653,494)	(42.748)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,442,678,895)	(4,988,086,443)	3,545,407,548	(71.078)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	27,608,826	(27,608,826)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	107,748,826	(107,748,826)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	80,140,000	(80,140,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,362,034	0	4,362,034	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,362,034	0	4,362,034	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,362,034	27,608,826	(23,246,792)	(84.201)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,438,316,861)	(4,960,477,617)	3,522,160,756	(71.004)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,438,316,861)	(4,960,477,617)	3,522,160,756	(71.004)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 23 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 23/01/25 6:35 AM

Tgl Cetak : 23/01/25 11:03 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,911,600,963	23,210,524,862	(1,298,923,899)	(5.6)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,438,316,861)	(4,960,477,617)	3,522,160,756	(71)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(9,402,500)	2,958,000	(12,360,500)	(417.87)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	968,000	(968,000)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(9,412,500)	0	(9,412,500)	0
LAIN-LAIN	10,000	1,990,000	(1,980,000)	(99.5)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(4,162,845,097)	3,658,595,718	(7,821,440,815)	(213.78)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,610,564,458)	(1,298,923,899)	(4,311,640,559)	331.94
EKUITAS AKHIR	16,301,036,505	21,911,600,963	(5,610,564,458)	(25.61)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 23 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DEDI SUPARDI

NIP. 198105092005021003